

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam menanggapi situasi keamanan, Amerika Serikat mempunyai beberapa manuver yang cukup unik dan bisa dikatakan Amerika Serikat adalah negara yang paling reaktif terhadap masalah keamanan. Dengan memusatkan perhatian pada keamanan yang terjadi di Afghanistan, Irak, Iran, dan Korea Utara yang masih menjadi pembicaraan politik dunia sehingga dapat merumuskan diskursus politik keamanan global, dalam hal ini adalah bentuk polarisasi abad 21.

Reaksi Amerika berkuat pada isu terroris, demokrasi hingga peningkatan kemampuan militer negara seperti China, India, Rusia, Uni Eropa (UE), Jepang, Iran hingga Irak diposisikan sebagai “masalah yang mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat”, tentu hal ini mengisyaratkan pada modifikasi keamanan kontemporer tentang penguatan militer versus keamanan itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan isu keamanan Amerika Serikat, peningkatan kemampuan juga ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan bersikap agresif. Agresor dari poros-poros kekuatan seolah menemukan momentum perkembangan yang signifikan sehingga secara tidak langsung dianggap berpotensi mereduksi kekuatan Amerika Serikat di mata internasional.

Pada isu keamanan dunia, sebagai representasi kehadiran Amerika Serikat atas kompleksitas keamanan di awal abad 21 serupa dengan konsep keamanan

sebelumnya lebih akrab menggunakan parameter alokasi dan kemampuan militer yang besar dan kuat untuk menegaskan supremasinya.

Dengan mengukur kapabilitas suatu negara dengan menakar kekuatan secara masif, Amerika Serikat secara rasional mempunyai pijakan berbeda dalam penguatan militer. Dalam invasinya atas Baghdad, seruan Donald Rumsfeld pada 2003 mengungkap kontradiksi dalam militer oleh entitas negara atas kekuatan militer dengan menandatangani kontrak dengan “tentara bayaran”.¹ Persoalan substansial dalam memahami konteks keamanan kontemporer dibutuhkan untuk mengkaji secara mendalam mengurai dan menelaah fakta tersebut.

Dengan demikian penulis memusatkan perhatian pada penggunaan militer swasta. Maka penulis memutuskan untuk memilih judul *“Penggunaan Milliter Swasta pada Sistem Keamanan Militer Amerika Serikat dalam perspektif Industrialisasi Militer”*

B. Latar Belakang

Di era globalisasi ancaman keamanan dalam level entitas kenegaraan juga semakin kompleks, berbagai perang besar yang terjadi menyisakan kekuatan negara-negara besar, dari unipolar (Perang dunia I dan II), bipolar (pada masa Perang Dingin), hingga pada paska Perang Dingin yang menyisakan sistem unipolar dengan Amerika Serikat sebagai sumbu utamanya. Paska perang besar di akhir Abad 20

¹Jeremy Scahill, *Black water : Membongkar Keterlibatan Tentara Bayaran dalam Invasi Militer Amerika Serikat*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2010, h.17

ancaman terkait keamanan global justru bergeser, tentara dan persenjataan canggih memang masih memegang penting dalam upaya keamanan, tetapi pergeseran ke ruang publik juga tidak dapat disepelekan dengan adanya terror di ranah sipil yang sekaligus telah dianggap bahwa terorisme adlah ancaman serius keamanan global.²

Pergeseran menyikapi orientasi keamanan oleh publik secara monumental ditandai dengan keruntuhan WTC, bahwa muncul agresor di sektor sipil, dan karena terjadi di wilayah Amerika Serikat maka secara tidak langsung menggeser tatanan global secara keseluruhan, sehingga pada level tertentu menunjukkan bahwa ancaman keamanan semakin meluas. Dengan hancurnya WTC yang tentu juga mempengaruhi hubungan antar negara dan menyisakan operasi militer seperti dalam upaya pemberantasan Al Qaeda di Afganistan, Irak dan kawasan lain di Timur Tengah, bahkan kemudian menjalar tentang adanya senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction-WMD*) di Irak menyingkap tabir yang makin keruh.

Beragam anggapan seputar invasi Amerika Serikat di berbagai operasi militer di Timur Tengah pada umumnya, dan Irak khususnya, oleh para ahli kemudian dianggap kurang mempunyai objek yang jelas, bahkan terkesan dipaksakan. Tinjauan dan asumsi kalangan akademis tidak lepas dari apa yang berkembang seputar keamanan Amerika Serikat paska tragedi 9/11, bahkan pada bahasan tertentu, para ahli menekankan asumsinya pada upaya untuk mengangkat pamor Amerika Serikat yang turun, mengingat pada awal abad 21 Amerika Serikat sering menghembuskan

² Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS), 2011., h.321

isu keamanan kontemporer dengan mengisahkan pasang surut keamanan global.

Dengan demikian muncul spekulasi dalam level akademis menyikapi isu yang berkembang, terutama yang bersentuhan langsung dengan keamanan negara adidaya pemenang Cold War, yaitu sistem keamanan yang diterapkan oleh Amerika Serikat mengingat tragedi 9/11 adalah bentuk eskalasi dari sejarah dari babak baru sekuritas Amerika Serikat.

Tragedi 9/11 juga melihat kemungkinan lebih lanjut bahwa keamanan menjadi fokus perhatian yang penting selain pijakan ekonomi, karena parameter keamanan memang tidak bisa terlepas pada Amerika Serikat, mengingat WTC dan Pentagon menjadi sasaran atas serangan yang berlangsung saat itu. Secara tidak langsung hal tersebut juga membuka kemungkinan bahwa Amerika Serikat juga berupaya melemahkan anggapan internasional terkait “Polisi Dunia” yang seharusnya menertibkan dan menjaga perdamaian dunia,³ bukan sebagai “sasaran tembak”⁴.

Selebihnya berbagai langkah yang diambil paska tragedi 9/11 di kawasan Timur Tengah yang dijalankan dengan cara represif, menimbulkan berbagai spekulasi tentang proyeksi kepentingan Amerika Serikat, salah satunya sebagai penjaga perdamaian. Sebagai benteng penjaga Amerika Serikat mempunyai mengadopsi sistem *pre-emptive self defense* yang menekankan paradigma birokrat Gedung Putih akan menyerang negara-negara yang dianggap mengancam keamanan, sekaligus hal ini membuktikan bahwa sistem keamanan Amerika Serikat tidak lagi bersifat

³ Amerika Serikat sebagai negara “Super Power” mempunyai peran sebagai Polisi Dunia, Joshua S. Goldstein, *Prosperity & War in The Modern Age*. New Haven: Yale University Press, 1988,. h. 19

⁴ Budi Winarno, *Op, Cit.*, h.176

defensive (menunggu adanya ancaman) tapi juga *offensive* (membasmi ancaman dari luar).⁵

Di Irak contohnya, isu yang berkembang juga mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat seakan enggan merampungkan perang dan terkesan berlarut-larut,⁶ padahal jelas jika upaya Amerika Serikat dalam menjalankan misi di Irak dengan mengedepankan sisi keamanan Global, seperti klaim administrasi Bush sebelum perang dimulai Irak sedikitnya mempunyai 500 ton gas mustard dan gas syaraf, 25.000 liter anthrax dan 38.000 racun botulinum serta lusinan rudal *scud* untuk mengirim bahan-bahan tersebut Amerika Serikat harus bisa membuktikan tuduhannya.⁷ Hal ini juga menandakan bahwa pendekatan sistem keamanan bukan lagi bersifat defensif, namun juga memberikan tekanan ofensif.

Invasi ke Irak tentu menyisakan beberapa kajian yang cukup menarik. *Pertama* adalah alasan demokratisasi, dengan menekankan seruan demokratisasi di negara tersebut maka jelas bahwa tuduhan Amerika Serikat atas rezim Saddam yang pada waktu itu otoriter, dan mendesak untuk digulingkan. Namun jika isu tersebut yang ditekankan maka hal tersebut tentu akan semakin memperkuat anggapan internasional bahwa Amerika Serikat mempunyai maksud lain, terutama pada sejarah Perang teluk dan sistem militer terhadap pengaruhnya di bidang politik Internasional.

Kedua, perdebatan soal invasi Timur Tengah yang diawali dengan pemusnahan

⁵ Budi Winarno, (2007), *Demokratisasi dan Perdamaian di Irak dan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, vol III (1) h. 429

⁶ Scahill, *op.cit.*, h. 27.

⁷ Winarno, *op.cit.*, h. 427.

Al Qaeda di Afghanistan dan tentu saja selanjutnya Irak, yaitu dengan menyiratkan anggapan bahwa Saddam Hussein dianggap terlibat sekenario 11 September 2001, karena Bush dan para penasihatnya juga menyampaikan tuduhan kalau Saddam Hussein menjalin kerjasama dengan Al Qaeda, sekalipun CIA membantah tuduhan tersebut. *Ketiga*, selain itu AS dibawah kepemimpinan Bush juga menyerukan bahwa Irak sedang membangun senjata pemusnah massal.⁸ Isu internasional yang berkembang kala itu adalah seruan bersama atas dasar solidaritas dan gentingnya keamanan di kawasan Timur Tengah. Pergeseran isu internasional juga mempertajam tuduhan terhadap tujuan invasi di Irak, strategi Amerika Serikat disinyalir mempunyai tujuan lain, sekalipun upaya pembebasan rakyat dan demokratisasi juga merupakan wacana yang cukup rasional. Malah dalam beberapa rilis berita, pemerintah Amerika Serikat menekankan bahwa Rezim Saddam yang otoriter ditengarai menjadi salah satu dasar invasinya. Propaganda Amerika Serikat ketika menuduh Saddam yang secara tidak langsung terlibat tragedi 9/11 dan selebihnya adalah kepemilikan senjata pemusnah massal menjadikan pandangan internasional mengenai studi keamanan kawasan menjadi kuat.

Dalam *pers release* Pentagon, Amerika Serikat bermaksud mengurai senjata pemusnah massal hingga pembebasan rakyat dari tirani atas rezim Saddam, yang cukup mencengangkan adalah yang *keempat*, yaitu terkait kasus penggelapan minyak

⁸ Sejak september 2011, Bush terus menyuarakan bahwa Saddam mempunyai senjata pemusnah massal dan diakhiri dengan laporan di hadapan DK PBB yang menyebutkan jika tuduhan mereka atas Irak pada Februari 2003 adalah salah, *Sikap DK PBB Terhadap Invasi Irak*, Majalah Tempo edisi 21-27 April 2003

di kawasan Irak.⁹

Lebih jauh lagi muncul isu yang *kelima*, dan cukup menyita perhatian terkait isu keamanan strategis, yaitu adanya kaum *hawkish* (sebutan untuk orang-orang yang menggilai perang) dalam operasi yang dilancarkan berkaitan dengan strategi penguasaan negara, pandangan kaum tersebut secara kasat mata kuat dengan asumsi pembenaran invasi, bukan tanggung jawab kebijakan demokratisasi. Sejak saat itulah permasalahan keamanan terus bergeser menjadi masalah yang *debateble* rumusan kebijakan keamanan internasional.

Skema rumusan keamanan Amerika Serikat sebagai tuduhan atas negara-negara teroris sebagai poros setan (Axis of Evil) yaitu negara yang memiliki senjata pemusnah massal seperti Irak, Iran dan Korea Utara.¹⁰ Campur tangan Amerika dengan justifikasi sepihak atas interpretasi tuduhan atas sebuah alasan terbesar yaitu untuk melindungi rakyat dari tragedi kemanusiaan, termasuk Irak yang sebagai tujuan Invasi. Keamanan internasional yang dimaksudkan secara tidak langsung memperkuat alasan bahwa kaum *hawkish* sangat kuat dalam birokrasi Pentagon dan Amerika Serikat selaku pemegang poros keamanan dunai yang Unipolar.

Pergeseran tata dunia tersebut juga berimbas pada perubahan sistem keamanan yang sebelumnya bersumbu pada sistem internasional, yang berkenaan dengan keamanan ternyata telah mengalami perubahan signifikan sejak akhir dari Perang

⁹ AS gelapkan minyak Irak 18M dollar, [Berita],
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/20/ln2ovs-as-gelapkan-uang-minyak-irak-18-m-dollar>, diakses 08/04/2012.;10.32

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_evil

Dingin, terutama di sisi Amerika Serikat sebagai pemegang kendali keamanan dunia sebagai akibat perubahan polarisasi kekuatan yang sebelumnya bipolar menjadi unipolar. Kekuatan militer Amerika Serikat juga tercatat memiliki angkatan bersenjata yang besar dengan persenjataan canggih dan modern sebagai konsekuensi sistem keamanan Amerika Serikat yang *offensive*.¹¹

Dengan adanya rumusan keamanan *offensive* Amerika Serikat, maka untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan dukungan untuk mendorong rencana strategis tersebut. Tercatat Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang tersebar di seluruh penjuru dunia seperti di Korea Selatan, Pakistan, Afghanistan, Australia hingga Greenland. Jumlah total tentara terbanyak di dunia juga dimiliki Amerika Serikat. Tercatat sebanyak 5.049.790 tentara atas gabungan dari tentara yang dimiliki Amerika Serikat sebagai respon atas perubahan keamanan dunia.

Dengan dukungan militer yang kuat itu, maka wajar jika Amerika Serikat melakukan Invasi ke Irak, terlebih Saddam merupakan target sasaran setelah upaya Amerika pada Perang Teluk I tidak cukup untuk menggeser kepemimpinan Saddam di Irak.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap keamanan kontemporer menyisakan pertanyaan mendasar terhadap situasi internal negara-negara besar di peta keamanan dunia. Invasi oleh Amerika Serikat di Irak sebagai *prototype* skema keamanan kontemporer melahirkan kajian militer yang strategis yang didasarkan dengan

¹¹ Terdapat banyak sekali peralatan militer Amerika Serikat yang bekerjasama dengan perusahaan dalam hal teknologi persentaan seperti halnya Tank, Hummer, hingga *Drone* (pesawat tanpa awak)

menimbang kekuatan dan jumlah tentara yang besar. Namun dengan besarnya kekuatan dan jumlah tentara yang sangat banyak, invasi Irak malah melibatkan *mercenaries* sebagai opsi alternatif yang sangat berpengaruh.

C. Rumusan Masalah

“Mengapa Pemerintah Amerika Serikat menggunakan militer swasta untuk melakukan penertiban keamanan, khususnya di Irak ?”

D. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisa tema dan menakar permasalahan dalam skripsi ini secara proporsional.

1. Teori Aktor Rasional

Model aktor rasional atau menurut Lovel disebut dengan persepsi elit, yang merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi proses perumusan secara signifikan dalam kebijakan luar negeri suatu negara setelah pembagian struktur internasional, strategi negara lain dan kapabilitas yang dimiliki negara. Tentu penulis menekankan analisa teori ini karena mempertimbangkan aktor di balik invasi Irak dan tentara bayaran sebagai opsi strategis.

Graham T. Allison mempunyai penjabaran mengenai pilihan rasional di samping model aktor rasional, bahwasannya terdapat dua model lainnya selain model aktor rasional yaitu model proses organisasi dan model politik birokratik, yang

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Dan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan model aktor rasional untuk menjelaskan tentang faktor pendorong internal mengenai perubahan kebijakan di dalam internal Amerika Serikat sendiri seperti yang dilakukan Amerika oleh Bush, Pentagon, G. Rumsfeld sampai Paul Bremer.

Terkait dengan masalah kebijakan, aktor rasional mempunyai pengaruh terhadap setiap proses pembuatan kebijakan luar negeri terutama Gedung Putih. Hal ini terjadi karena politik luar negeri dianggap sebagai suatu akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan atau kebijakan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual, yaitu dimana birokrasi dicirikan mempunyai perilaku individu yang bernalar, selalu memiliki pemikiran yang rasional dan terkondisi, seperti tertuang dalam Foreign Affairs yang menjadi transformasi Pentagon oleh G. Rumsfeld.

Asumsi dasar dari model aktor rasional yaitu negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, tentu dalam model ini mengacu pada negara atau para pembuat keputusan yang dipandang sebagai *solitary actor* (satu-satunya aktor atau aktor utama) yang melihat permasalahan dengan mengurai secara parsial hingga dalam analisisnya diupayakan untuk dapat memaksimalkan tujuan dari kemungkinan lingkungan yang diciptakan politik internasional, sehingga nantinya akan tercapai kepentingan nasional negara tersebut sesuai dengan tujuan yang di tekankan pembuat keputusan.

Dalam buku Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Mohtar

Mas' oed mendefinisikan model aktor rasional sebagai berikut:

...suatu politik luar negeri yang dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan tersebut yang dimaksud dapat berupa pilihan-pilihan atau juga alternatif-alternatif yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena tertentu.¹²

Menurut Graham T. Allison, dalam teori hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, terdapat 3 model pembuatan keputusan politik luar negeri, antara lain: model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik.

Dalam kasus ini, model pembuatan keputusan yang akan digunakan oleh penulis adalah model aktor rasional. Dalam model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku pemerintah ini dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi yang di aplikasikan dalam aspek militer. Pembuat keputusan juga berusaha menetapkan pilihan-pilihan militer atas alternatif-alternatif yang ada.

Analisis aktor rasional pada pilihan opsi militer terpusat pada telaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa dan alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa di ambil Bush dengan memperhitungkan untung rugi dari adanya alternatif-alternatif tersebut, yaitu mengkolaborasikan alternatif tentara bayaran dan tentara reguler dalam medan yang sama. Maka secara jelas teori ini dapat

¹² Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Lab. HI Fisipol UMY., h. 234-235

menjelaskan keadaan strategis dari para pembuat keputusan, seperti Bush, Bremer hingga kolaborator lain untuk melihat pertimbangan rasional.

Pembuat keputusan melihat kemungkinan tentara bayaran untuk berkolaborasi dengan tentara reguler, bahkan dalam beberapa aspek Gedung Putih dan Pentagon menemukan alasan strategis dalam penggunaan opsi alternatif ini

Disamping itu Greg Casman dalam bukunya yang berjudul *What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict*, menyediakan satu set langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:¹³

a useful set of steps in the rational model: (1) Identify problem, (2) Identify and rank goals (3) Gather information (this can be ongoing), (4) Identify alternatives for reaching goals,(5) Analyze alternatives by considering consequences and effectiveness (costs and benefits) of each alternative and probabilities associated with success, (6) Select alternative that maximizes chances of selecting best alternative as determined in step five, (7) Implement decision, (8) Monitor and evaluate.

Dalam jabaran Greg Casman jelas bahwa aktor rasional, pada awalnya memusatkan perhatian pada identifikasi masalah. Sama halnya ketika aktor rasional invasi Amerika Serikat atas Irak, perilaku aktor dibalik perumusan invasi Irak oleh pentagon sangat terkoordinasi sehingga dapat dikatakan bahwa rancangan awalnya sangat dipengaruhi dengan pertimbangan untung rugi, dengan cara mengidentifikasi secara parsial.

Pertama identifikasi masalah dalam negeri menjadi acuan untuk memutuskan sikap politik luar negeri. Agenda utama jelas bahwa Amerika berupaya menegakkan

¹³ Greg Cashman, *What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict*. New York: Lexington Books, 1993., h. 32

kembali supremasi pasca 9/11 sebagai poros utama keamanan dunia, dan ketakutan warga Amerika bisa terhapus.

Langkah *kedua* adalah menghadapi kritikan dalam negeri sebelum, saat sampai pada sesudah invasi, bahwa tentara bayaran bisa diberhentikan kapan saja selepas pekerjaan dan operasi mereka selesai. Dan spesifikasi pekerjaan serta rantai komando mereka yang jauh lebih pendek menjadi takaran perencanaan target menjadi lebih terstruktur.

Ketiga, informasi yang di aransemen Pentagon bersama Gedung Putih jelas bahwa penyerangan di Irak dilakukan pada saat kekuatan Saddam lemah, jauh berbeda ketika Perang Teluk I.

Keempat, alternatif perencanaan dalam menggalang kekuatan jelas, dengan melihat peluang tentara bayaran maka pembentukan kekuatan di Irak oleh pemangku keamanan Irak menjadi lazim, tentu mengacu pada dasar profesionalisme yang Amerika tawarkan pada keamanan setempat yang pada saat itu sempat mandeg. Pertimbangan alternatif tentara dan polisi sangat sederhana, bahwa rakyat setempat jauh lebih mengetahui aktifitas sipil dan upah mereka yang relatif murah, sekalipun secara kualitas sangat berbeda.

Kelima, dan keenam analisa penggunaan opsi alternatif tentara bayaran yang didasari pada biaya anggaran menjadi pertimbangan vital, mengingat penggunaan tentara bayaran ternyata lebih murah, apalagi dengan adanya tentara bayaran yang bukan berasal dari Amerika Serikat. Bahkan keputusan dalam melatih keamanan setempat menjadi tentara alternatif jelas, bahwa teori ini digambarkan dengan

konstelasi para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria efektifitas dan optimalisasi hasil. Tentu dengan tentara bayaran yang profesional dan melibatkan tentara setempat serta mengutus pejabat pilihan ke lapangan. Maka jelas bahwa alternatif yang dipilih harus diformulasikan untuk perolehan hasil yang maksimal. Dengan demikian, rencana jangka panjang telah terbentuk. Fondasi keamanan yang dibangun juga didasari oleh kekuatan masyarakat Irak, yang tetap dalam monitor Gedung Putih.

Ketujuh adalah implementasi, aktor rasional jelas memilih tentara bayaran sebagai opsi yang bukan saja rasional, tapi juga sangat menggiurkan. Implementasi yang dicanangkan dengan melibatkan tentara bayaran sangat minim tanggung jawab, efisiensi waktu, dan efektif dalam kurun waktu tertentu.

Tahap *kedelapan* adalah monitoring dan evaluasi, sangat penting ketika melihat tahapan ini melalui takaran efektifitas. Dan yang lebih penting lagi adalah jeratan internasional, kesalahan yang dilakukan tentara bayaran tentu saja tidak dapat dijerat, beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam monitoring inilah yang menjadi acuan sebelum dilakukan evaluasi lebih jauh.

Dengan adanya langkah-langkah yang ditekankan oleh aktor rasional maka jelas bahwa aktor rasional bukan hanya ada di belakang meja sebagai penulis rumus, namun juga harus menugaskan analis lapangan agar rantai birokrasi lebih pendek dalam identifikasi masalah, seperti Paul Bremer yang di tugaskan di Irak yang harus selalu siap dalam melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka (orang-orang) di pemerintahan dan Pentagon juga diasumsikan dapat

melakukan penelusuran cepat dan tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang ingin dilakukan, yaitu dengan sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pada tahapan ini PMC dan tentara bayaran mendapatkan porsi. Jika melihat alasan pertimbangan pembuat keputusan militer di Irak, pilihan opsi tentara bayaran oleh Gedung Putih dan Pentagon sangatlah rasional dan umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama menyangkut politik luar negeri Amerika) didasari oleh peran aktor rasional.

2. Definisi tentara bayaran dalam Hukum Humaniter

Perang dan militer sangat erat kaitannya dalam konteks konflik bersenjata dan tentu saja identik dengan pemusnahan salah satu atau kedua belah pihak. Pengaturan tentang perang dimaksudkan agar perang juga untuk meminimalisir penderitaan yang ditimbulkan dengan melindungi dan membedakan kepada yang tidak terlibat. Dengan adanya pengaturan tentang perang juga mengatur tentang angkatan bersenjata (*armies*) yang mengacu pada atribut perang, hingga disebut angkatan bersenjata yang sama sekali berbeda dengan sipil.

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan penghormatan hakikat kemanusiaan. Bahwa politik internasional yang anarkis adalah sah jika suatu negara menggunakannya untuk tujuan-tujuan militer. Namun dari segi dan masalah HAM dalam kehidupan internasional, mungkin tidak ada wilayah dalam kehidupan internasional yang

didukung oleh pandangan konsensus mengenai kewajiban dengan sedemikian kuatnya seperti pandangan konsensus mengenai HAM pada tatanan internasional. Sehingga hal ini juga mengacu pada kesepakatan tentang kajian tentang tentara bayaran.

Menurut Nathan tentara bayaran atau mercenaries sebagai:¹⁴

Tentara yang disewa pemerintah luar negeri atau gerakan pembentuk dalam memberi kontribusi yang menuntut konflik bersenjata, apakah secara langsung terlibat dengan persetujuan atau secara tidak langsung melalui logistik jasa pelayanan nasihat dan intelijen, dan siapapun yang melakukan hal itu diluar otoritas pemerintah dan pertahanan negara asalnya.

Sedangkan menurut Konvensi Jenewa, militer swasta, *mercenaries* atau tentara bayaran dengan mengacu pada Protokol Tambahan (*Additional Protocol*) dari *Jenewa Convention* pada 12 Agustus 1949 dibahas pula protokol yang membahas dengan protokol *Protocol of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1)*, yang tertuang pada pasal 47. Maka tentara bayaran adalah :

- direkrut secara khusus baik didalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata
- benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik
- mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah satu pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata tersebut

¹⁴ Veronika Sintha Saraswati, *Imperium Perang Militer Swasta: Neoliberalisme dan Korporasi Bisnis Keamanan Kontemorer*, Yogyakarta: Resist Book, 2009, h.71

- bukan kewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak
- bukan angkatan bersenjata salah satu pihak dan,
- belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini.

Dan sebagai tambahan, berdasarkan *Protocol I Additional to the Geneva Conventions* 1997 (Protokol I) Artikel 47.c. Semua yang tergabung bersama tentara bayaran sesuai pasal tersebut diatas, kemudian pada 1997 ditambah dengan termasuk juga kontraktor yang tertangkap bersama tentara bayaran akan kehilangan haknya dan mendapat status tahanan perang. Protokol I menjadi landasan kuat berkaitan dengan tanggung jawab negara yang bertikai. Protokol ini tidak akan berlaku untuk tentara bayaran yang sering menekankan patriotisme semu sebagai "pejuang kemerdekaan" karena secara definitive berbeda dengan tentara reguler.¹⁵ Upaya dalam menegakkan kemanusiaan dalam melembagakan definisi seperti aturan internasional berikut ini;

- The Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa
- The 1977 Protocol I Additional the Geneva Convention
- The United Nation International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries

¹⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_militer_swasta#section1 diakses pada 09/05/2012 pada pukul 13:09

E. Hipotesis

Pemerintah Amerika Serikat menggunakan militer swasta untuk melaksanakan penertiban keamanan di Irak karena alasan pertimbangan rasional. Penggunaan tentara bayaran menawarkan efektifitas dan efisiensi dalam pembagian kerja dan membuat capaian target yang lebih terstruktur.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat eksplanatif dalam melihat permasalahan mengenai pembentukan sistem keamanan yang transformasional oleh Amerika Serikat paska 9/11, dan invasi Irak sebagai sekuritas kawasan, tentu tanpa meninggalkan sejarah panjang mengenai transformasi pemerintah AS selaku negara adi daya, yang memiliki kecenderungan mengambil kebijakan represif bagi negara-negar yang tidak berkomitmen kuat dalam sekuritas global. Pandangan ini juga ditinjau dari motivasi *actor* birokrat Amerika Serikat dalam mengupayakan sistem keamanan yang seringkali berbenturan dengan hukum internasional.

G. Tujuan

1. Menjelaskan alasan dibalik sikap dan kebijakan pemerintah AS yang represif terhadap Irak, serta negara-negara yang dinilai enggan menjalankan demokrasi, tentu juga termasuk negara-negara yang mempunyai komitmen rendah terhadap keamanan serta mempunyai ancaman yang serius bagi AS.

2. Mendeskripsikan bagaimana variabel-variabel selain keamanan juga memiliki peranan dan implikasi kuat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS tentunya berkaitan dengan transformasi sistem keamanan yang di aplikasikan di Irak.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konteks industrialisasi dan liberalisasi ternyata mempunyai terminologi yang ekstrem, bahkan dalam bidang keamanan dapat memainkan peran pemerintah secara terbuka, sekalipun hal itu sering bertolak belakang dengan HAM sebagai pilihan-pilihan strategis.

H. Metode penelitian

1. Metode Analisis

Skripsi ini akan menggunakan model analisa eksplanatif dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada. Model analisis ini lebih bersifat koheren yang tentunya menggali lebih banyak variabel yang berkaitan hingga menemukan variabel kunci.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipercaya, skripsi ini akan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh tentu berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang seperti buku, jurnal, koran, situs internet serta sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu “Kontraktor Swasta dan Privatisasi Militer” berupa kontrak didapat serta adanya mobilisasi kekuatan. Penunjukan kontraktor swasta yang menegaskan kembali sebagai sistem yang masuk dalam sebuah perangkat keamanan yang transformasional sekaligus berani. Dibalik konteks kekerasan, otoritas kebijakan keamanan juga dipengaruhi sektor publik dan menjelaskan keamanan kontemporer.

Bab III membahas “Transformasi Militer AS dalam Hubungan Internasional Kontemporer” sebagai bagian yang berisi variabel dependen yaitu, transformasi negara menyentuh transformasi bidang keamanan. Bab ini juga melihat posisi negara menjawab tantangan keamanan yang berevolusi. Mata rantai perubahan berbagai dimensi struktur, sistem dan aktor keamanan dilatar belakangi oleh peran negara. Bab ini juga mengurai tanggung jawab negara yang membedakan perubahan sosial, baik yang bersentuhan dengan tanggung jawab kemanusiaan maupun pencarian sumber ekonomi. Terutama mengenai kasus Irak sebagai studi kasus penggunaan tentara bayaran.

Bab IV membahas bisnis perang dan keamanan Internasional dalam pandangan Aktor Rasional dengan studi kasus Irak yang mengupas hubungan antar kedua variabel yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yakni kontraktor Swasta dan

Privatisasi Militer menyentuh fungsi negara dengan dimensi Transformasi militer AS dalam Hubungan Internasional Kontemporer menjadi unit-unit kecil yang melahirkan mekanisme keamanan pada tingkatan sistem maupun struktur yang lebih besar, maka aktor rasional dalam menakar tawaran hasil menjadi bagian dari upaya Pentagon, sekaligus menjadi tolak ukur acuan perubahan sistem keamanannya.

Bab V berisi kesimpulan yang akan mengelaborasi pembahasan-pembahasan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat diambil kesimpulan apakah hipotesa dapat menjawab pokok permasalahan dengan analisis secara mendalam dengan penjabaran sistematis secara tepat atau tidak. Selanjutnya Bab ini juga berisi saran-saran untuk penelitian lanjutan dan preskripsi bagi penelitian selanjutnya mengenai desain maupun metamorfosis pengamanan kontemporer.